

RINGKASAN KARYA TULIS

Ridy *et.al.* Kajian Kesiapan Peternak Sapi Perah Menghadapi Kesepakatan
Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dengan
Industri Pengolahan Susu (IPS)
Dibawah bimbingan Etriya, SP, MM

Usaha persusuan di Indonesia sudah sejak lama dikembangkan. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan persusuan di Indonesia dibagi menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu Tahap I (periode sebelum tahun 1980) disebut fase perkembangan sapi perah, Tahap II (periode 1980 – 1997) disebut periode peningkatan populasi sapi perah, dan Tahap III (periode 1997 sampai sekarang) disebut periode stagnasi. Pada tahap I, perkembangan peternakan sapi perah dirasakan masih cukup lambat karena usaha ini masih bersifat sampingan oleh para peternak. Pada tahap II, pemerintah melakukan impor sapi perah secara besar-besaran pada awal tahun 1980-an. Tujuan dilakukannya impor besar-besaran adalah untuk merangsang peternak untuk lebih meningkatkan produksi susu sapi perahnya. Selain itu, peningkatan populasi sapi perah ditunjang oleh permintaan akan produk olahan susu yang semakin meningkat dari masyarakat. Di samping itu, pemerintah mencoba melakukan proteksi terhadap peternak rakyat dengan mengharuskan Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk menyerap susu dari peternak. Sedangkan untuk tahap III, perkembangan sapi perah mengalami penurunan dan stagnasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di samping itu, pemerintah mencabut perlindungan terhadap peternak rakyat dengan menghapus kebijakan rasio susu impor dan susu lokal terhadap IPS (Inpres No.4/1998). Kebijakan ini sebagai dampak adanya kebijakan global menuju perdagangan bebas *barrier*. Berdasarkan dengan kebijakan tersebut, maka peternak harus mampu bersaing dengan produk susu dari luar negeri, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seiring dengan perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia, berbagai permasalahan persusuan pun semakin bertambah pula baik permasalahan dari sisi peternak, koperasi, maupun dari industri pengolahan susu. Selama ini susu yang dihasilkan para peternak sapi perah Indonesia hanya dapat memenuhi 30 persen kebutuhan susu untuk Industri Pengolahan Susu (IPS). Sisanya 70 persen, IPS mengimpor susu untuk menutupi kekurangan tersebut.

Baru-baru ini, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang merupakan wadah gabungan koperasi susu se-Indonesia yang saat ini memasok susu ke IPS, membuat kesepakatan dengan IPS yang terdiri dari PT Nestle Indonesia, PT Ultra Jaya, PT Frisian Flag, PT Sari Husada, dan PT Indolacto-Indomilk. Inti utama dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa GKSI menjadi pemasok tunggal bahan baku susu kepada IPS. Artinya, setiap peternak yang ingin susunya diserap oleh IPS, diharuskan untuk bergabung dengan koperasi primer yang merupakan anggota dari GKSI. Kesepakatan ini, secara kasat mata memang merupakan peluang untuk para peternak sapi perah. Karena adanya jaminan penyerapan susu melalui koperasi. Namun, jika ditinjau lebih dalam lagi kesepakatan ini juga menyatakan bahwa IPS hanya akan menyerap susu dari peternak yang telah

memenuhi syarat kuantitas dan kualitas tersebut. Padahal saat sekarang ini para peternak sapi perah sedang menghadapi masalah yang terkait dengan rendahnya produksi susu sapi perah dan kualitas susu yang dihasilkan. Penyebab utamanya antara lain ketersediaan bibit terutama bibit unggul, ketersediaan pakan, dan manajemen peternakan sapi perah di Indonesia yang masih tradisional. Oleh karena itu, untuk menjamin agar kesepakatan ini dapat berjalan dengan efektif perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti pengoptimalisasian kemampuan berproduksi sapi perah, menurunkan harga penjualan pakan konsentrat, dan supervisi dan jaminan ketersediaan hijauan yang berkualitas tinggi.

Kata kunci : *Industri Pengolahan Susu (IPS), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), GKSI sebagai pemasok tunggal susu kepada IPS, ketersediaan bibit, ketersediaan pakan,, manajemen peternakan sapi perah*